RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

I. LATAR BELAKANG

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023 ini dapat disusun dan selesai tepat waktu. Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023 merupakan implementasi dari pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah wajib memublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa RLPPD dipublikasikan paling sedikit melalui:

a. 3 (tiga) media cetak harian dan/atau media *online*:
b. Papan pengumuman yang mudah diakses publik; dan
c. *Website* resmi pemerintah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyajian baik secara substansi, redaksional maupun *outline* dalam laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, demi terwujudnya penyajian yang lebih baik, diharapkan seluruh masyarakat, terkhusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

masyarakat Kabupaten Kediri dapat memberikan tanggapan atas RLPPD sebagai masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam kegiatan penyusunan RLPPD Kabupaten Kediri Tahun 2023 ini, sehingga dapat disampaikan tepat pada waktunya. Semoga RLPPD Kabupaten Kediri Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

II. RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023

1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro dapat mengukur kinerja Pemerintahan Daerah dengan menggunakan 6 (enam) indikator kinerja makro yaitu:

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2) Angka Kemiskinan
3) Angka Pengangguran
4) Pertumbuhan Ekonomi
5) Perdapatan Per Kapita
6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Adapun capaian kinerja dari ke-6 Indikator Kinerja Makro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA 2022	CAPAIAN KINERJA 2023	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	74,2	74,68	0,647
2	Angka Kemiskinan	%	10,65	10,72	0,66
3	Angka Pengangguran	Persen	6,83	5,79	-15,227
4	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,9	4,53	-7,551
5	Pendapatan/PDRB Perkapita	Juta rupiah	28,17	30,19	7,171
6	Ketimpangan Pendapatan	persen	0,329	0,306	-6,991

Sumber : BPS Kabupaten Kediri

Perubahan capaian kinerja makro merupakan hasil dari capaian kinerja makro Tahun 2023 dikurangi capaian kinerja makro Tahun 2022 dibagi capaian kinerja makro Tahun 2022 dikali 100%, sebagaimana rumus berikut:

$$\text{RUMUS} = \frac{\text{capaian kinerja makro tahun pelaporan} - \text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}{\text{capaian kinerja makro tahun sebelumnya}}$$

2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome u rusan pendidikan diukur oleh 4 IKK yaitu:

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	92,71
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	98,57
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	89,85
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	94,05

B. URUSAN KESEHATAN

Urusan Kesehatan di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome urusan kesehatan diukur oleh 14 IKK yaitu:

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk (Per 1.000 Penduduk)	0,82
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	100
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	100
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	97,9
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	96,42
8	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	90,2
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	73,9
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	90,5
NO	**JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI**	**CAPAIAN (%)**
11	Persentase Penderita Diabetes Melitus Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	92,03
12	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	100
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	100
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur oleh 9 IKK yaitu:

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)	KET
1	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten	100	Tidak ada kewenangan Wilayah Sungai
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kabupaten	100	Tidak ada kewenangan Wilayah Sungai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	100	
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota	85,37	
5	Persentase Jumlah Rumah Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	93,2	
6	Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten	100	
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	97,09	
8	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	100	
9	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	100	

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rayat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diukur oleh 5 IKK yaitu:

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)	KET
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	100	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	100	Tidak ada kegiatan fasilitasi rumah layak huni untuk Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kab Yang Ditangani	76,08	
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,94	
5	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)	31,83	

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Trantibumlinmas di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Satpol PP dan BPBD Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan Indikator Kinerja Kunci Outcome Urusan Trantibumlinmas diukur oleh 7 IKK.

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	59,42
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	17,07 Menit

F. URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial di Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kediri. Adapun capaian penyelenggaraan IKK Outcome Urusan Sosial diukur oleh 2 IKK, yaitu sebagai berikut:

NO	JENIS INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100

3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA.

A. HASIL EPPD ATAS LPPD PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI:

1) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022 dengan Status Kinerja Rendah karena adanya kesalahan input data dukung dan adanya indikator yang tidak memiliki data dukung.
2) Untuk Tahun 2023 ini melalui upaya reviu dan asistensi dan dilakukan beberapa perbaikan agar permasalahan pelaporan LPPD Tahun 2022 tidak terulang dan dapat memperoleh status kinerja tinggi.
3) Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023 ***(Belum diumumkan)***

B. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1) Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 Kabupaten Kediri mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2022.
2) Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun 2023 belum keluar karena Laporan Keuangan Pemerintah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kabupaten Kediri Tahun 2023 masih dalam proses audit BPK

3) Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri selama 7 (tujuh) tahun terakhir yaitu dari Tahun 2016 s/d Tahun 2022, Kabupaten Kediri mendapat penghargaan WTP sebanyak 7 kali berturut-turut.

4. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

A. PENERIMAAN

1) Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 3.060.891.450.606,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.163.467.890.431,88 atau 103,35% (Unaudited).

2) Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 586.353.720.275,00 dan terealisasi sebesar Rp. 636.075.970.326,88 atau tercapai sebesar 108,48%.

3) Pendapatan Transfer Kabupaten Kediri Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 2.471.381.349.331,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.526.670.467.437,00 atau tercapai sebesar 102,24%

4) Pendapatan Lain-lain daerah yang sah Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.156.381.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 721.452.668,00 atau tercapai sebesar 22,86%

5) Realisasi PAD Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebesar Rp. 636.075.970.326,88 terhadap realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Rp. 3.163.467.890.431,88 atau sebesar 20,11%

B. PENGELUARAN

1) Total anggaran belanja APBD Kabupaten Kediri

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun 2023 sebesar Rp 3.521.886.388.405,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.288.924.911.656,40 atau 93,39 %

2) Total anggaran Belanja Operasi Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebesar Rp. 2.388.440.438.915,00 terealisasi sebesar Rp. 2.196.425.893.300,31 atau mencapai 91,96%
3) Total anggaran Belanja Modal Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebesar Rp. 514.825.900.280,00 terealisasi sebesar Rp. 483.080.137.961,09 atau mencapai 93,83%
4) Total anggaran Belanja Tak Terduga Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebesar Rp. 9.188.359.260,00 terealisasi sebesar Rp. 709.476.100,00 atau mencapai 7,72%
5) Total anggaran Belanja Tranfer Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebesar Rp. 609.431.689.950,00 terealisasi sebesar Rp. 608.709.404.295,00 atau mencapai 99,88%

5. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi penerimaan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran, antara lain berasal dari penggunaan SILPA tahun lalu dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi pengeluaran yang dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran, antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, penyertaan modal pemerintah, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

pembayaran kewajiban lainnya. Realisasi Pembiayaan Tahun 2023 sebagaimana berikut :

A. Penerimaan Pembiayaan Rp. 520.994.937.799,94

B. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 60.000.000.000,00

6. INOVASI DAERAH

Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintahan	OPD
1	e.kinerja	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	Kepegawaian	Bag. Organisasi & BKD
2	"DUKUN LABAS TEMAN SAPU" (PEDULI LINGKUNGAN MELALUI BANK SAMPAH DAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Umum
3	TABASERAT (DATABASE KESENIAN AKURAT)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4	SAHAJA LEKAT (SATU HARI JADI LEBIH DEKAT)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil
5	SITA BAPER ER PEGI (SISTEM DATABASE PERIZINAN BERBASIS PETA DIGITAL)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Penanaman modal	DPMPTSP
6	SAPPA KOP (Sistem Informasi Pelaporan dan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Digital	Koperasi, usaha kecil, dan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Pengawasan Koperasi)	Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		menengah	
7	GERAK SI JEMPOL '17 (Gebrakan Serempak Vaksinasi Covid Jemput Bola 17 Desa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kesehatan	PKM
8	SAHAJA ONLINE (SATU HARI JADI ONLINE)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil
9	Si Jari Manis (INVENTARISASI, PENJARINGAN, INFORMASI DAN KOORDINASI INOVASI)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Penelitian dan Pengembangan	Balitbangda
10	SIMTARU (SISTEM INFORMASI TATA RUANG)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Perkim
11	HALO MASBUP (Sistem Laporan Masyarakat Kabupaten Kediri)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	
12	Aplikasi Mutasi Siswa Online (Si – Imut)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pendidikan	Dinas Pendidikan
13	SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN ALAT TULIS DAN PELAPORAN “SIPINTAR”	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	Keuangan, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bag. Pembangunan
14	SAMBADA (Simulasi ANBK Bagi Siswa Sekolah Dasar)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pendidikan	Dinas Pendidikan
15	SIDAPOTIK (system informasi data potensi investasi terintegrasi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Investasi	DPMPTSP
16	PECEL KEDIRI (Petani Cabe Lereng	Inovasi Daerah lainnya sesuai	Non Digital	Pangan, pertanian	Dinas Pertanian dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Kelud Bersinergi)	dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah			Perkebunan
17	"JUM'AT NGOPI" (Ngobrol Persoalan	Inovasi Daerah lainnya sesuai	Non Digital	ketenteraman, ketertiban	
	dan Solusi)	dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah		umum, dan pelindungan masyarakat	
18	"SANAK" (Sahabat anak dan Keluarga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak	DP2KBP3A
19	"ANTI RIBET" (PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KUNJANG MELALUI MEDIA SOSIAL BERUPA WHATSAPP)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Pemberdayaan masyarakat danDesa	Kecamatan Kunjang
20	“BRAIN GAME AND PUZZLES MEMBUAT PJJ SEMAKIN MENYENANGKAN”	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Pendidikan	SDN
21	“Pak BarungUnik” (Media Pohon Angka dan Bangun Ruang untuk Anak Kritis dan Kreatif)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	Pendidikan	SDN Wates
		kewenangan Daerah			
22	"SI DALI BUMIL CERDAS"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kesehatan	PKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

23	“KALI SIJI” (Kartu Kendali Beroba tPasien Jiwa)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kesehatan	PKM
24	“PELAS TANTRI” (Pendaftaran Puskesmas Pelas Tanpa Antri)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Kesehatan	PKM Pelas
25	Pembayaran Pajak Daerah dan Tiket Wisata Non Tunai	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Koperasi, usaha kecil, dan menengah, pariwisata, Keuangan	Bapenda
26	E Rekomendasi	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan	Bakesbangpol
				ketentuan peraturan perundang-undangan	
27	EMAs (Emergency & Medical Assistance)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kesehatan	RS-SLG
28	Si Jaka (Sistem Jejaring Kardiovaskular)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Kesehatan	RS – SLG
29	SI-TAMU (Sistem Informasi Tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekwan
30	AKROBAT (Antar ke Rumah Obat Anda Tanpa Antri)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	Kesehatan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		kewenangan Daerah			
31	ASIAP (Asisten Antar Pasien)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi	Non Digital	Kesehatan	
		kewenangan Daerah			
32	Simarko (Sistem Manajemen Pasar dan Sembako)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pangan, perdagangan	Dinas Perdagangan
33	Simnangkis (Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Sosial	Dinas Sosial
34	SENTRA HAKI KABUPATEN KEDIRI	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Komunikasi dan informatika, Penelitian dan Pengembanga n	Balitbangda
35	METHARIZIUM (Mengamankan Pangan untuk Negeri)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Pertanian	Dinas Pertanian Perkebunan
36	TARUNAKU (Layanan antar obat gratis kerumah MU)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	RS Kabupaten Kediri
37	PANJI CORPU (Panjalu Jayati Coorporate University)	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Non Digital	Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
38	Simoli Cekat (Aksi Mobil Keliling Cek Kualitas Air Tawar) SIMOLI CEKAT	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Perikanan	Dinas Perikanan
39	SAYANG GADIS (Sahaja Datang Disablitas Senang)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil
40	OMA LANSIA	Inovasi Pelayanan Publik	Non digiital	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil
41	SAHAJA PRIMA	Inovasi	Digital	Administrasi	Dispendukcapil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Pelayanan Publik		kependudukan dan pencatatan sipil	
42	SAHAJA PUTIH ABU-ABU	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dispendukcapil
43	Aplikasi e-SAKIP	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Pemerintahan	Bag. Organisasi
44	Aplikasi E-RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Permukiman	Dinas Perkim
45	ICSA (Internal Control Selft Assessment) Finance and Asset	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Keuangan	BPKAD
46	Gerakan CENTING (Cegah dan Tangani Stunting)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	Dinas Sosial
47	E-Audit dan E-Consulting	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Pemerintahan	Inspektorat
48	Aplikasi SIMPELTERUKUR (Teraulang)	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Perdagangan	Dinas Perdagangan
49	Cafe Sanak (Sahabat Anak dan Keluarga)	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	DP2KBP3A
50	DLH Menyapa	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
51	WebGIS D3TLH Berbasis Ekosistem	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
52	MAKIN KECE SKALI (MAKan IkaN Kediri CErdas Stunting taK Ada Lagl)	Inovasi Pelayanan Publik	Non digital	Kesehatan	Dinas Perikanan dan DP2KBP3A
53	Kamera empat sisi Pelayanan PKB dan Whatsapp Gateway PKB	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Perhubungan	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

					Kediri
54	SIPANDA	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	DP2KBP3A
55	Penggunaan produk dalam negeri		Non digital	Pemerintahan	Bagian Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
56	One Stop Service (OSS) Penanganan stunting & wasting di RSUD Kabupaten Kediri	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri DP3AKB Seluruh Puskesmas di Kabupaten Kediri Seluruh Kecamatan di Kabupaten Kediri
57	SI LPPD	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan	Digital	Pemerintahan	Bag. Tata pemerintahan

7. PRESTASI DAERAH

Penghargaan/Prestasi Daerah yang berhasil di raih oleh Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala (Internasional/ Nasional/Provinsi)	Ket.
1.	Instansi Terbaik Ketiga dalam pemanfaatan Aplikasi Srikandi	Kementerian Komonikasi dan Informatika Republik Indonesia	Nasional	
2.	Evaluasi SPBE (Kategori Memuaskan)	Kementerian PAN RB	Nasional	
3.	Penghargaan WTP Tahun 2022	BPK RI	Nasional	
4.	Pengawasan Kearsipan (Kategori Memuaskan)	Arsip Nasional Republik Indonesia	Nasional	
5.	Sertifikat Penerima Hijau - Pemerintah Kabupaten Kediri	OMBUDSMAN RI	Nasional	
6.	Sertifikat PEKPPP Kabupaten Kediri	Kementerian PAN RB	Nasional	
7.	Sertifikat LKE KEMENPAN RB	Kementerian PAN RB	Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

8.	LHE AKIP Kab Kediri Tahun 2023	Kementerian PAN RB	Nasional	
9.	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
10.	Kader Terbaik Kabupaten/Kota	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
11.	Juara 3 Nasional Lomba Video Layanan Inspiratif (Inovasi Layanan) Fasilitas Kesehatan	BPJS Kesehatan	Nasional	
12.	Top 7 Finalist of Central Sterilization Indonesia Hero Award 2023	I-CSPA	Nasional	
13.	Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022	Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia	Nasional	
14.	PenghargaanPemerintah Daerah denganDukungan Tinggi dalamPelaksanaan IKM oleh Satuan Pendidikan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
15.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPencapaian Target Aksi NyataTransisi PAUD ke SD yang MenyenangkanLebih Awal di Jenjang SD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
16.	Penghargaan Pemerintah Daerah dengan Capaian Tinggi untuk Aksi NyataTransisi PAUD SD di Jenjang SD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
17.	PenghargaanPemerintah Daerah denganCapaian Tinggi untuk Aksi NyataTransisi PAUD SD di Jenjang PAUD	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	
18.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPemanfaatanRapor Pendidikan oleh SatuanSekolahMenengahPertamaTertinggi	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiDirektoratJenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur	Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

19.	PenghargaanPemerintah Daerah denganPartisipasi dan Kontribusidalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2023.	Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendidikan Islam	Nasional	
20.	Penilaian Kota/Kabupaten Sehat KKS) Tinukat Swasta Saba Padaoa	Kemenkes	Nasional	
21.	Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	
22.	Penilaian Kota/Kabupaten Layak Anak(KLA) Tingkat Madya	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nasional	
23.	Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2023	Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Nasional	
24.	DUKCAPIL HEBAT	Kementrian Dalam Negeri	Nasional	
25.	Penghargaan kategori pembangunan sosial berkelanjutan pada program Jumat Ngopi atau Ngobrol Persoalan dan Solusi.	B-Universe	Nasional	
26.	Penghargaan dengan predikat BAIK pada capaian Predikat Sistem Merit dan Kualitas Pengisian JPT	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Nasional	
27.	Instansi Terbaik Ketiga dalam Pemanfaatan SRIKANDI Tingkat Pemerintah Kabupaten	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	Nasional	
28.	KLA (Kabupaten/Kota LayakAnak)	KementerianPemberdayaanPerempuandanPerlindanganAnak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	
29.	APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindangan Anak (PPPA) Republik Indonesia	Nasional	
30.	Swasti Saba Pada (Kabupaten Sehat)	Kementerian Dalam Negeri	Nasional	
31.	Implementasi Anaku Sehat dan Cerdas " Early Childhood Care, Nutrition and Education" (ECCNE) awards untuk penurunan stunting	SEAMEO RECFON dan BKKBN	Nasional	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

32.	Universal Health Coverage	BPJS Kesehatan	Nasional	
33.	Mitra Bhakti Husada (K3 perkantoran)	kementerian Kesehatan	Nasional	
34.	SMK3 perkantoran	kemeterian tenaga kerja	Nasional	
35.	akreditasi LABKES (PARIPURNA)	kementrian kesehatan republik indonesia	Nasional	
36.	Akreditasi Puskesmas (Untuk 34 PKM)	Kementerian Kesehatan RI	Nasional	
37.	Rekor Penyajian Sate Lele Terbanyak	Musium Rekor Dunia Indonesia (Muri)	Nasional	
38.	Pelaksanaan Brawijaya Aquatic 2023	Ketua Pelaksana Brawijaya Aquatic	Nasional	
39.	Juara 2 Tenaga Kesehatan Teladan Profesi Apoteker Puskesmas Tingkat Provinsi Jawa Timur	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
40.	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
41.	Juara 1 Think Bureaucracy (Lomba Cerdas Cermat ASN Berkinerja)	Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
42.	Pengumuman TOP FINALIS KOVABLIK 2023	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
43.	Sertifikat Radar Kediri	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	Provinsi	
44.	Open Defecation Free (ODF} Award	Dinkes Provinsi Jatim	Provinsi	
45.	Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Peringkat Ill Kategori Pemerintah Daerah Pembina Desa	Gubernur Provinsi Jatim	Provinsi	
46.	Patriot Jawi Wetan Kategori Inovasi Pertahanan Negara	Gubernur Provinsi Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V / Brawijaya	Provinsi	
47.	Penghargaan Public Service of The Years Jawa Timur 2023	Markplus Institute	Provinsi	
48.	Juara Iii Kabupaten Dengan Jumlah Desa Yang Telah Tervaksin Pmk Terbanyak Tingkat Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Satgas Penanganan PMK Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
49.	Markplus Institute Awards "Publik Services of The Year Jawa Timur 2023"	Markplus Institute	Provinsi	
50.	Lomba Video Kreatif Usaha Ekonomi Perdesaan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Pemenang Kategori Wisata Desa	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
51.	Anugrah Patriot Jawi Wetan Tahun 2023	Polda Jatim Dan Pemprov Jatim	Provinsi	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

52.	UKM Berprestasi 2023 Kategori Kuliner	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
53.	Jenis Koperasi Pemasaran Lomba Koperasi Berprestasi Provinsi Jawa Timur	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
54.	Piagam Prov. Kirei Na Hana Kesbang	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
55.	Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji detikJatim Awards 2023 dalam kategori Pembangunan Infrastruktur Daerah	Detikcom	Provinsi	
56.	Peringkat V ASN Achievement Awards Kategori Lembaga Pelatihan Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	
57.	Penghargaan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK dan SKD CPNS 2023	Kanreg II BKN Surabaya	Provinsi	
58.	Kabupaten/Kota Menuju Informatif	Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	Provinsi	
59.	Juara Ketiga Website Pemda Terbaik pada Berita Jatim Digital Award 2023	PT. Beritajatim Cyber Media	Provinsi	
60.	Juara 1 Lomba Duta Genre TkJawaTimur	BKKBN ProvinsiJawaTimur	Provinsi	
61.	Juara 2 Lomba APE BKB TkJawaTimur	BKKBN ProvinsiJawaTimur	Provinsi	
62.	Pelaksanaan Hari Ikan Nasional Ke 10	Ketua Forikan Jawa Timur	Provinsi	
63.	Pembinaan Terbaik Pengembangan Budidaya Lele Sistem Sirkulasi	Gubernur Jawa Timur	Provinsi	

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023 kami sampaikan, semoga menjadi media penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kediri.

Kediri, 27 Maret 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KEDIRI

Hanindhito Himawan Pramana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN